

**PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DALAM
MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN KEPADA
MASYARAKAT KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh

RINA APRILIA

NIM: 18.3.15.0049

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksinya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palu, 15 Desember 2022 M
21 Jumadil Awal 1444 H

Penulis



Rina Aprilia
NIM : 18.3.15.0049

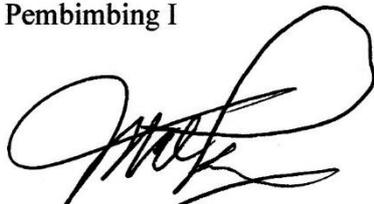
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Masyarakat Kota Palu.” Oleh Rina Aprilia, NIM: 18.3.15.0049 Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat di ajukan untuk diujikan.

Palu, 15 Desember 2022 M
21 Jumadil Awal 1444 H

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Malkan, M.Ag
NIP. 19681231 199703 1 010

Pembimbing II



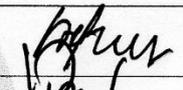
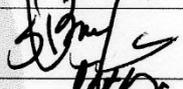
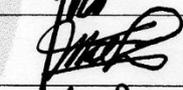
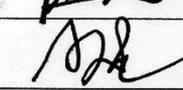
Abdul Jalil, S.E., M.M
NIP. 19871110 201903 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Rina Aprilia, NIM 18.3.15.0049 dengan judul “Peran OJK Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Masyarakat Kota Palu” yang telah di ujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 14 Februari 2023. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, Februari 2023 M
Rajab 1444

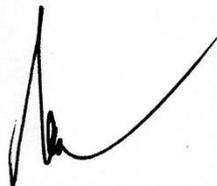
DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Penguji Utama I	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Penguji Utama II	Dr. Ubay, S.Ag., M.Si	
Pembimbing I	Dr. Malkan, M.Ag	
Pembimbing II	Abdul jalil, S.E., M.M	

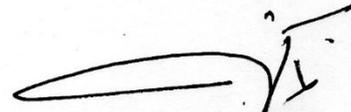
Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua
Jurusan Perbankan Syariah



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002



Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.I
NIP. 19860204 201403 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt berkat rahmat dan karunianya –Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **”PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT KOTA PALU”** Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak Awaluddin dan Ibu Jumiati yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang dan senantiasa mendo’akan dan memberikan motivasi serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dasar sampai saat ini, Semoga Allah Swt membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat –Nya. Aamiin.

2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dr. H Abidin M.Ag., Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H Kamaruddin, sebagai Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dan Dr. Mohamad Idhan, S.Ag.,M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan lancar.
3. Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dr. Ermawati, S.Ag.,M.Ag., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Drs. Saparuddin, M.H.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan. Dr. Malkan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni Dan Kerjasama Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I.,M.E, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah. Abdul Jalil S.E,M.M., selaku sekertaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. yang telah mengorbankan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan memudahkan perencanaan awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Dr. Malkan, M.Ag. selaku pembimbing I dan Abdul Jalil S.E, M.M, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga

dan pikiran untuk memberikan bimbingan, bantuan dan pengarahannya serta motivasi kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu. Rifai, S.E., M.M dan staf perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku- buku yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai referensi dalam menyusun skripsi.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membekali ilmu pengetahuan dan senantiasa membantu dalam kepengurusan penyelesaian studi serta dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Triyono Raharjo selaku kepala kantor OJK Sulteng dan Pupung Pamungkas, Risa Puji Astuti yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng.
9. Untuk saudara kandung saya, Fitriyani dan Yudi Adi Rangga yang memberikan motivasi dan dorongan dan telah memberikan semangat begitu tinggi kepada penulis.
10. Askar support system terbaik saya, terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal yang baik, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberi semangat.
11. Selviana teman terbaik saya, terimakasih telah menjadi partner saya selama SMK hingga Kuliah, yang menemani saya dalam senang maupun sedih, mendukung saya dalam kesulitan dan memberikan semangat untuk tidak menyerah.

mampu penulis berikan. Terimakasih karna selalu ada ketika penulis membutuhkan hal-hal yang diperlukan bukan hanya dalam penyusunan skripsi ini melainkan hal-hal yang mungkin menjadi kisah indah yang bisa dikisahkan masa depan nanti.

14. Teman-teman Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2018 terkhusus keluarga Perbankan Syariah 2 angkatan 2018 yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang ikut adil dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini yang tidak tertulis di sini, terimakasih atas segala kebaikan karena telah membantu penulis. Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi sempurnanya penelitian selanjutnya. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya serta membuahkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT. Aamiin.

Palu, 15 Desember 2022 M
21 Jumadil Awal 1444 H

Penulis



Rina Aprilia
NIM : 18.3.15.004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.	9
D. Penegasan Istilah.	10
E. Garis-Garis Besar Isi	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terlebih Dahulu.....	15
B. literasi Keuangan.....	19
1.Pengertian	19
2.Dasar Literasi Keuangan.....	23
3.Literasi Keuangan Menurut Perspektif Islam	24
4.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan.....	25
5.Strategi Literasi Keuangan.....	26
6.Tujuan Literasi Keuangan	28
C. OJK (Otoritas Jasa Keuangan).....	29
D. Sinergi Literasi Keuangan.....	33
E.Kerangka Pemikiran.....	37

BAB III METODE	
PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Dan Desain.	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Jenis Data.	41
D. Objek Dan Subjek Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL DAN	
PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Sulteng.....	48
1. Sejarah Berdirinya Kantor OJK Sulteng.....	48
2. Profil Kantor OJK Sulteng.....	49
3. Landasaan Hukum Kantor OJK Sulteng.....	50
4. Visi Misi Kantor OJK Sulteng.....	51
5. Struktur Organisasi Kantor OJK Sulteng.....	53
B. Hasil Penelitian.....	54
1. Peran OJK Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan.....	54
BAB V	
PENUTUP.....	61
1. Kesimpulan.....	61
2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terlebih Dahulu	17
3.1 Nama Informan.....	44

Daftar Gambar

2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
4.1 Struktur Organisasi.....	53

DAFTAR SINGKATAN

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

IJK : Industri Jasa Keuangan

LJK : Lembaga Jasa Keuangan

SNLKI : Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia

UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah

BI : Bank Indonesia

BEI : Bursa Efek Indonesia

UU : Undang-Undang

TPAKD : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

ABSTRAK

Nama : RINA APRILIA
Nim : 18.3.15.0049
Judul : PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGA) DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT KOTA PALU

Literasi keuangan *financial literacy* yang artinya pemahaman terhadap keuangan, menurut buku pedoman strategi nasional literasi keuangan Indonesia, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan *knowledge*, keyakinan *confidence*, dan keterampilan *skill* konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik. Literasi keuangan tidak akan sampai pada masyarakat bila tidak ada suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga dalam mensosialisasikan tentang literasi keuangan tersebut. Sosialisasi mengenai literasi keuangan di Indonesia di lakukan oleh OJK sebagai sebuah lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Data diperoleh dari wawancara penelitian seperti kantor OJK Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan dalam pengumpulan data dengan observasi tidak langsung, wawancara tidak langsung, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor OJK Otoritas Jasa Keuangan Sulteng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran OJK Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Masyarakat kota Palu sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program strategi nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan 3 pilar dimana ketiga pilar tersebut merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat yang *well literate*, adapun ketiga pilar tersebut adalah, yaitu: pertama, pilar edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, kedua, penguatan infrastruktur literasi keuangan, ketiga, pengembangan produk dan jasa keuangan.

Dari kesimpulan yang diperoleh perlu ditingkatkan Kembali program-program edukasi dan kampanye nasional dengan aspek jangkauan masyarakat yang menyeluruh sehingga penegetahuan masyarakat akan literasi keuangan lebih baik sehingga terwujud masyarakat yang *Well Literate*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%.

Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%.¹ Menurut data Bank Dunia (*world bank*), Indonesia adalah negara ketiga yang mempunyai tingkat literasi keuangan paling lemah setelah India dan Cina. Kondisi tersebut jelas kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan kesahtraan suatu masyarakat terhadap akses keuangan. Karena itu, kebutuhan perkembangan keuangan mikro dan program keuangan inklusif (*financial inclusion*) yang lebih efektif dan efisien.

Praktik ekonomi yang *ekklusif* menjadi belenggu kemiskinan dan pengangguran, dibutuhkan terobosan untuk menghasilkan kehidupan ekonomi yang *inklusif*. Sistem layanan keuangan yang *inklusif* sejatinya merupakan ikhtiar untuk menciptakan karakter kehidupan ekonomi yang tidak hanya mengakomodasi

¹ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan dalam <http://www.ojk.go.id> (diakses tanggal: 22 februari 2022 pukul 10:28 WITA)

kalangan berada namun juga memihak kalangan berpenghasilan rendah dan miskin

Penyebab kemiskinan adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi serta tidak meratanya pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, dalam arti merata dan berkualitas.²

Adapun definisi yang lebih operasional ditawarkan oleh *House Of Commons Treasury Comittee* yang menyebut bahwa *Finacial Inclusion* merupakan kemampuan perorangan dalam mengakses berbagai produk jasa keuangan yang terjangkau serta sesuai dengan kebutuhannya. Kemampuan ini utamanya berkaitan dengan satu kompleks pemahaman yang meliputi *Financial awareness*, pengetahuan tentang bank dan jaringan perbankan dan pengetahuan mengenai berbagai fasilitas yang disediakan dunia perbankan serta permohonan atas berbagai keuntungan memanfaatkan saluran perbankan pemahaman tersebut masuk dalam indikator masyarakat yang telah *well literate* dalam bentuk literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan perangkat penentu utama dalam mewujudkan inklusi keuangan, tahapan ini mengandung muatan pengenalan *basic knowledge* dan *basic skilill* dalam memahami karakteristik produk dan profil risiko keuangan, potensi menjadi korban transaksi keuangan juga akan semakin besar.

Dalam hal ini keuangan inklusif merupakan salah satu instrumen yang menunjang literasi keuangan dan strategi nasional keuangan inklusif.

Menurut Lusardi dalam penelitian Krisna literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan.³ Hal ini

² Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif : Membongkar Hegemoni Keuangan*. (cet.I Jakarta : Gramedia, 2014), hlm 51.

dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong globalisasi, lebih spesifiknya globalisasi masalah dalam bidang keuangan. Sedangkan menurut Houston dalam penelitian Widyawati menyatakan bahwa literasi keuangan terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. ⁴Remund dalam penelitian Widyawati menyatakan ada empat hal yang paling umum dalam literasi keuangan yaitu penganggaran, tabungan, pinjaman, dan investasi. ⁵Literasi keuangan tidak hanya melibatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menangani masalah keuangan tetapi juga atribut nonkognitif.

Menurut lembaga Otoritas jasa keuangan menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang, OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan

³ Krishna, Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (*proceeding of The 4th International Conference on Teacher Education : Join Conference UPI & UPSI Bandung , Indonesia, 8-10 November 2010*), hal 552-560.

⁴ Widyawati, irin. 2010 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, *Jurnal Asset : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1 (1) : 89-99

⁵ Ibid

masyarakat tidak mudah tertipu produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan resikonya.⁶

Literasi memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat yaitu, *Pertama* meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *Less Litarate* atau *Not Literate*, *Kedua* meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Literasi Keuangan juga bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan, mengenai produk lembaga jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat menentukan kebutuhan keuangan yang baik dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Literasi keuangan memiliki peranan dalam meningkatkan pemahaman pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam literasi keuangan pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk indonesia dibagi menjadi empat bagian yaitu, *well literate, sufficient literate, less litarate, not literate*.⁷

OJK sebagai sebuah regulator keuangan meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. OJK telah menerbitkan Strategi

⁶Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan dalam [Http://www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id) (diakses tanggal : 24 Februari 2022 pukul 13:00 WITA)

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan dalam [Http://www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id) (diakses tanggal : 24 Februari 2022 pukul 13:57 WITA)

Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis.⁸

Semakin tinggi literasi keuangan akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itulah berbagai rangkaian kegiatan untuk mensosialisasikan layanan keuangan terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tak kalah penting edukasi tersebut ditujukan kepada kelompok masyarakat yang sejauh ini jarang bersentuhan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), seperti kelompok petani, nelayan, pedagang atau lainnya. Tingkat literasi kelompok masyarakat tersebut tidak begitu bagus. Pemanfaatan jasa keuangan oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut juga tidak banyak.⁹

Literasi keuangan harus dapat mengedukasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan. Literasi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Literasi Keuangan OJK*, (cet.I Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2015), hal.3

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan* dalam <http://www.ojk.go.id> (diakses tanggal : 24 februari 2022 Pukul 20.00 WIB).

OJK sangat intensif menstimulus masyarakat untuk mengenal dan mengerti produk-produk jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan. Untuk mendorong masyarakat lebih dekat dengan produk dan layanan keuangan sangatlah dibutuhkan terutama bagi masyarakat menengah bawah. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan produk jasa keuangan. Oleh karena itu, lembaga jasa keuangan melalui produk dan layanannya harus menjadi mitra bagi masyarakat dan dapat menyediakan produk/layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

OJK menambahkan ada dua hal utama yang perlu didorong yaitu perluasan akses keuangan masyarakat dan peningkatan literasi keuangan. Itu yang akan menjadikan industri jasa keuangan menjadi mitra masyarakat. Dalam mewujudkan itu semua, kerjasama yang erat antara otoritas jasa keuangan, pemerintah dan industri jasa keuangan sangatlah dibutuhkan. Dimana literasi keuangan dapat berjalan dengan baik apabila di dukung pula dengan program keuangan inklusif yang mana bila kedua program tersebut dijalankan dapat menghasilkan *usage* atau manfaat yang baik. Inklusi keuangan sendiri bermakna sebagai sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, noneklusif yang dapat memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat.¹⁰

Dari dua hal itu, pada 18 Desember 2014 lalu OJK bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pemerintah meluncurkan salah satu program yakni Layanan Keuangan Mikro.¹¹

¹⁰ Ibid,

¹¹ ibid

Layanan Keuangan Mikro adalah layanan terpadu yang memiliki proses sederhana dan cepat, akses yang mudah, dan harga terjangkau. Dengan layanan ini, masyarakat dapat mengakses produk simpanan, proteksi, investasi dan pinjaman. Oleh karena itu, OJK bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berusaha mendekatkan masyarakat salah satunya dengan melalui Layanan Keuangan Mikro. Program ini juga termasuk sebagai salah satu strategi literasi keuangan yang disusun oleh OJK dan lembaga jasa keuangan.

Dengan hasil survei tersebut OJK bersama IJK menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang di dalamnya terdapat berbagai macam program strategis dan program inisiatif yang bertujuan untuk lebih meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.¹²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2019 bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh di atas nasional.

Indeks literasi dan inklusi keuangan nasional 2019 berturut-turut sebesar 38 persen dan 76.2 persen sedangkan Provinsi Sulteng tumbuh sebesar 39 persen dan 84,5 persen meningkat dari pada tahun 2016 yang berturut-turut sebesar 22,55 persen dan 65,09 persen. Pencapaian tersebut tidak lepas dari hasil Kerjasama lintas pemangku kepentingan, termasuk pelaku Industri Jasa Keuangan (IJK) yang telah bekerja sekitar tiga tahun terakhir.

Survei dilakukan menggunakan metode multi-stage stratified random sampling dengan penataan OJK mencakup sektor perbankan, pasar modal,

¹² Ibid,

perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, pegadaian dan IJK lainnya. Di Sulteng dilakukan di kota Palu, Kabupaten Banggai dan Donggala.

Survey menggunakan parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku responded untuk mengukur indeks inklusi keuangan menggunakan (usage) meliputi menggunakan produk atau jasa pada satu tahun terakhir.

Pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan Sulteng 2019 yang di atas rata-rata nasional tersebut juga merupakan hasil dari kampanye literasi dan inklusi keuangan yang terstruktur melalui program-program unggulan. Antara lain, Laku Pandai (branchless banking), Asuransi Pertanian, Yuk Nabung Saham, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (MI), Mekaar, Financial Technology (Fintech) dan lain sebagainya.

OJK Sulteng dan para pelaku IJK akan terus meningkatkan peran dalam rangka mewujudkan IJK yang kontributif dan inklusif terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui fungsi intermediasi dan fasilitas penciptaan sumber-sumber ekonomi kerakyatan yang baru untuk mendukung upaya pemerataan kesejahteraan di Sulteng.¹³

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Sulawesi Tengah kaitannya dengan meningkatkan literasi keuangan. Untuk itu, penulis mengambil judul “PERAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DALAM

¹³Hasil Interview dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Pada Tanggal 06 Oktober 2022, Pukul 13:00 WITA)

MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN PADA MASYARAKAT KOTA PALU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat Kota Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Kota Palu

2. Kegunaan

Memperkuat ilmu pengetahuan khususnya tentang peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat Kota Palu.

a. Bagi subyek peneliti

Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi OJK Sulawesi Tengah terkait peningkatan literasi keuangan pada masyarakat.

b. Bagi penelitian

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam mata kuliah yang lebih nyata dan untuk menambah ilmu pengetahuan.

D. Penegasan Istilah

Proposal ini berjudul “Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Masyarakat Kota Palu. Studi Kasus pada Kantor

Cabang Sulteng”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul proposal ini, maka penulis akan memberikan penjelasan yaitu:

1. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang di jalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik.¹⁴

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dibidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel sehingga mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Edisi Revisi 2014,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 323.

kepentingan masyarakat dan konsumen.¹⁵

2. Lembaga Jasa Keuangan

Lembaga keuangan menurut Dahlan Siamat adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) atau tagihan-tagihan (claim) misalnya saham, obligasi, dibandingkan aset riil misalnya: gedung, peralatan, dan bahan baku.¹⁶

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.¹⁷ Harus diakui jika setiap negara dalam membangun dan menggerakkan roda ekonominya membutuhkan peran lembaga keuangan, terutama para pebisnis.

Dapat dilihat jika negara yang aktivitas ekonominya tinggi maka peran lembaga keuangan pasti tinggi. Oleh karena itu lembaga keuangan yang berada di suatu negara harus selalu berada dalam keadaan sehat, tidak hanya secara jangka pendek namun juga secara jangka panjang. Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat.¹⁸

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan* dalam <http://www.ojk.go.id> (diakses tanggal : 25 Februari 2022 Pukul 11.50 WITA).

¹⁶ M. Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*, 2004, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang. hlm. 16.

¹⁷ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Salemba Empat, 2011) hlm. 5.

¹⁸ Hermansyah, “*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*”, hlm. 35.

Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa.¹⁹

Masyarakat mengenal lembaga jasa keuangan dalam dua bentuk yaitu: bank dan bukan bank. Kedua lembaga ini telah begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pemecah solusi dari setiap masalah yang timbul.

Secara praktis kedua lembaga keuangan ini sama-sama bertugas sebagai *agent of development*. Artinya keputusan dan peran mereka bukan semata-mata untuk mengejar profit saja namun lebih dari itu yaitu sebagai pendorong pembangunan.

3. Literasi Keuangan

Literasi keuangan (*financial literacy*) yang artinya paham keuangan, menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau

¹⁹ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Salemba Empat. 2011), hlm. 10.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “*Literasi, Edukasi, dan Inklusi Keuangan*”, Direktorat Literasi dan Edukasi (2014), 4.

memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

E. Garis-Garis Besar Isi

Proposal skripsi ini berjudul “Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Masyarakat Kota Palu”. Terdiri dari tiga bab yang meliputi bagian awal, isi dan penutup, masing-masing bab memiliki pembahasan sendiri-sendiri, namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, Bab ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, garis-garis besar isi.

BAB II Landasan Teori, Dalam sub bab ini akan mengurai lebih mendalam mengenai landasan teori atau konsep-konsep Literasi Keuangan, dan Peran OJK.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini mencakup metode yang digunakan dalam penelitian dari jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data-data, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Analisis Data dan Pembahasan, Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yakni profil atau gambaran umum mengenai OJK Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, menjelaskan jawaban beserta analisis mengenai rumusan masalah yakni peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat kota palu.

BAB V Penutup, Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, dan saran-saran yang ditunjukkan untuk pihak terkait baik masyarakat, OJK, mahasiswa dan sebagainya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berbicara tentang objek penelitian yang berjudul Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan, sejatinya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, seperti :

Jurnal yang ditulis oleh Arif Widyatama "*pendidikan akuntansi dalam bangunan literasi keuangan UKM dalam mengurangi tingkat kemiskinan*" hasil analisis menunjukkan bahwa literasi bagi UKM merupakan suatu hal yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan. ²¹UKM memegang peranan sentral dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di suatu wilayah.

Jurnal yang ditulis oleh Tutik Mardiani yang berjudul *Peran Pengetahuan, Sikap, dan Gender Terhadap Perilaku Keuangan Bisnis Startup Kota Palu*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan gender secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan bisnis startup kota palu. Hasil penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan terhadap keuangan sehingga terjadi *well literate* atau pengetahuan terhadap keuangan sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan

²¹ Arif widyatama "*Peran Pengetahuan, Sikap, dan Gender Terhadap Perilaku Keuangan Bisnis Startup Kota Palu Pendidikan Akuntansi Dalam Bangunan Literasi Keuangan UKM Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan*", Vol 25, Jurnal Kolaboratif Sains, 2020, hlm 13.

dalam mengelola uang dalam sebuah penggunaan. Manajemen itu sendiri adalah sebuah bentuk dari literisasi keuangan²²

Jurnal yang ditulis oleh Tutik Mardiani yang berjudul *Peran Pengetahuan, Sikap, dan Gender Terhadap Perilaku Keuangan Bisnis Startup Kota Palu*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan gender secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan bisnis startup kota palu. Hasil penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan terhadap keuangan sehingga terjadi *well literate* atau pengetahuan terhadap keuangan sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan dalam mengelola uang dalam sebuah penggunaan. Manajemen itu sendiri adalah sebuah bentuk dari literisasi keuangan²³

Jurnal yang ditulis oleh Winda Yanti yang berjudul *Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha Kuliner di Kecamatan Palu Barat*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inklusi keuangan, literasi keuangan dan keberlangsungan usaha berperan dalam proses pertumbuhan usaha kuliner di Kecamatan Palu Barat. Kemudian inklusi keuangan dan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha kuliner di Kecamatan Palu Barat. Selanjutnya inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap

²² Tutik Mardiani, Darman Darman, “*Peran Pengetahuan, Sikap, Dan Gender Terhadap Perilaku Keuangan Bisnis Startup Kota Palu*”. Vol. 8 no 2, Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako 2022. Hlm 15.

²³ Tutik Mardiani, Darman Darman, “*Peran Pengetahuan, Sikap, Dan Gender Terhadap Perilaku Keuangan Bisnis Startup Kota Palu*”. Vol. 8 no 2, Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako 2022. Hlm 15.

keberlangsungan usaha kuliner di palu barat. Dan literasi keuanga berpengaruh terhadap keberlangsungan kuliner di Kecamatan Palu Barat.²⁴

Dalam jurnal Lusardi, *Mitchell The Economics Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*, menerangkan bahwa edukasi terhadap masyarakat dalam rangka menciptakan manusia yang berwawasan luas dan memiliki pandangan ke depan khususnya dalam pengetahuan pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Dalam bukunya Nusron Wahid yang berjudul *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, dalam upaya mewujudkan *financial inclusion* dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan proses. Tahapan mewujudkan *financial inclusion* dapat dibagi menjadi empat tahapan penting, yaitu tahap *literacy, penetration, density, dan delivery*.²⁶

²⁴Winda Yanti, Syamsul, Siti Zuroh, *Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha Kuliner Di Kota Palu*, Vol 5, Jurnal Kolaboratif Sains, 2022, hlm 8.

²⁵ Lusardi, Mitchell *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence.*, di unduh pada tanggal 30 Feberuari 2022 , Pukul 10:00 WITA.

²⁶ ibid

TABEL 2.1**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terlebih Dahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Arif Widyatama 2020	pendidikan akuntansi dalam bangunan literasi keuangan UKM dalam mengurangi tingkat kemiskinan	sama-sama meneliti tingkat literasi keuangan	perbedaan yaitu penelitian tersebut meneliti pada tingkat literasi di UKM
2.	Tutik Mardiani 2022	Peran Pengetahuan, Sikap, dan Gender Terhadap Perilaku Keuangan Bisnis Startup Kota Palu.	sama-sama meneliti tentang literasi keuangan	perbedaan yaitu penelitian ini mengarah kepada pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan Bisnis Startup Kota Palu
3.	Winda Yanti 2022	Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha Kuliner di Kecamatan Palu Barat	sama-sama meneliti tingkat literasi keuangan	perbedaan penelitian ini yaitu lebih kepada Terhadap Keberlangsungan Usaha Kuliner di Kecamatan Palu Barat

B. Literasi Keuangan

1. Pengertian

Definisi literasi keuangan sangat bervariasi, seperti beberapa diantaranya, Lusardi dan Mitchell mendefinisikan *literacy financial* sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (*Knowledge and Ability*). Menurut Lusardi dan Mitchell *The economic importance of financial literacy theory and evidence* dimana dijelaskan strategi literasi keuangan dilaksanakan dengan menggunakan strategi edukasi yang sesuai dengan kelompok atau dengan kata lain sesuai dengan tingkatan masyarakat seperti tingkat pendidikan, strata sosial, dan kelompok usia. Sementara itu, Dones dan Hira serta Chen dan Volpe mengartikan literasi keuangan sebagai pengetahuan untuk mengelola keuangan (*Financial Literacy is Money Management Knowledge*).²⁷

Adapun literasi keuangan adalah menurut The President Advisory Council On Financial Literacy dalam Hung mendefinisikan *Financial Literacy: the ability to use knowledge and skills to manage financial resource effectively for a lifetime of financial well being*. (literasi keuangan adalah sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan serta keahlian untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan). Literasi keuangan merupakan pengetahuan tentang keuangan dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut (mengaplikasikannya) untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut Manurung literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan

²⁷ Lusardi, A & Mitchell, O.S. "BabyBoomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth". *Journal of Monetary Economics*, 2007 54(1), hlm.205-224.

dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. Sedangkan menurut pendapat ahli Kaly, Hudson dan Vush dalam penelitian Widyawati mengartikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepat ke dalam perilaku.²⁸

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami. Jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang OJK mengatakan bahwa hal penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara pintar, agar rendahnya pengetahuan akan industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak akan mudah tertipu.²⁹ Terhadap investasi-investasi bodong.

Literasi keuangan juga merupakan perangkat penentu utama dalam mewujudkan *a. knowledge* dan *basic skill* dalam memahami sektor keuangan. Tahap literasi ini penting dalam sektor keuangan, tanpa bisa memahami karakteristik produk dan profil risiko keuangan, dapat menyebabkan potensi menjadi korban transaksi keuangan.³⁰

²⁸ Widayati, Irin. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, *Jurnal Asset: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1 (1): hlm. 89-99.

²⁹ SBY Resmikan Blueprint Literasi Keuangan”.www.sindonews.com diunduh pada 20 Agustus 2022.

³⁰ Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*.(Cet I; Jakarta: Gramedia, 2014), hlm 102.

Aktivitas yang paling penting dalam tahapan ini adalah sosialisasi dan edukasi secara masif terkait jenis, karakter, dan profil risiko masing-masing produk keuangan serta dasar-dasar pengelolaan keuangan yang baik.

Literasi tidak akan tercapai hanya dengan membangun kesadaran terhadap sektor keuangan saja melainkan harus ada program penunjang literasi tersebut. dalam hal ini terdapat empat tahapan dalam literasi keuangan yaitu *literasi, penetration, density, dan delivery*.³¹

Literacy merupakan perangkat utama dalam mewujudkan *financial inclusion*, tahapan ini mengandung muatan pengenalan *basic knowledge* dan *basic skill* dalam memahami sektor keuangan dengan program yang dijalankan seperti edukasi dan kampanye nasional yang di lakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen dan masyarakat.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melaksanakan program literasi keuangan dengan tujuan agar masyarakat bukan hanya menjadi *well literate* dalam masalah keuangan, melainkan juga menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka sebagai salah satu bentuk *implementasi*.³²

Edukasi dan kampanye yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dilakukan dengan menyusun program edukasi dan kampanye nasional

³¹ Ibid,

³² Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

literasi keuangan, melaksanakan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan.

- a. *Penetration* merupakan tahapan lanjutan dalam mewujudkan literasi keuangan, dalam tahap ini masyarakat sudah memiliki kesadaran tentang kebutuhan layanan keuangan.³³ Kebutuhan paling penting dalam tahap ini adalah *supply side* layanan keuangan, baik yang berupa produk maupun infrastruktur layanan keuangan baik berupa produk maupun infrastruktur layanan seperti kantor, agen, teknologi informasi. Dalam program strategi yang di lakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan melaksanakan program seperti kuliah umum, *training of trainer*, edu expo.
- b. *Density* merupakan tahap di mana kondisi masyarakat sebagai konsumen dalam lembaga jasa keuangan sebagai produsen sudah berada dalam kondisi memenuhi syarat untuk membangun jalinan kerjasama. Dalam tahap ini yang paling penting adalah adanya desain produk dan layanan keuangan yang menarik dan dapat diterima di pasar. KUR merupakan contoh dari segi *Density*.
- c. *Delivery* merupakan tahap dimana literasi keuangan dan *financial inclusion* sudah terjadi, ditandai dengan fakta bahwa produk dan layanan keuangan yang dapat diterima dengan baik oleh pasar. Pada tahap ini kebutuhan yang paling penting adalah lembaga keuangan harus memilih jalur distribusi (*delivery channel*) yang dekat, mudah dijangkau oleh rakyat

³³ Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan..*, (Cet. I.Jakarta: Gramedia, 2014.), hlm 102.

kecil, dan murah. Seperti pada program laku pandai yaitu layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.³⁴

2. Dasar Literasi Keuangan

Yang menjadi dasar adanya program literasi keuangan adalah adanya temuan dari data Bank Dunia bahwa tingkat akses masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal hanya sebesar 36,1% atau lebih rendah dibanding dengan negara ASEAN lainnya seperti, Thailand, Malaysia dan Singapura. Selain itu pula yang menjadi alasan pentingnya literasi keuangan adalah angka rasio savings to GDP Indonesia yaitu sekitar 31%, lebih rendah dari Singapura sebesar 49%, Filipina sebesar 46%, serta China 49%.³⁵

Hal ini dipengaruhi juga tingkat literasi masyarakat Indonesia yang mana pengertian dari literasi keuangan sendiri adalah setiap orang memiliki pengetahuan yang memadai untuk merencanakan dan mengatur keuangan pribadinya dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Tingkat literasi yang memadai dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik, terhindar dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya dikarenakan rendahnya pendapatan seseorang, kesulitan keuangan yang dialami oleh seseorang bukan dari pendapatan semata, tetapi bisa juga disebabkan karena kesalahan manajemen (*mismanagement*) keuangan.³⁶

³⁴ Ibid,

³⁵ Surat Edaran OJK SP109/DKNS/OJK/X/2016

³⁶ Krishna, Ayu; Rofaida, Rofi; Sari, Maya. 2010. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya" www.file.upi.edu diunduh pada 18 April 2017.

3. Literasi Keuangan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berbeda dengan literasi keuangan secara konvensional literasi keuangan Syariah merupakan pemahaman seseorang mengenai keuangan secara Syariah. Pemahaman ini termasuk prinsip dasar, akad transaksi, Lembaga, dan juga produk keuangannya. System ekonomi islam sudah semestinya diterapkan secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 208 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut Langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”³⁷

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir ayat berikut diturunkan mengenai Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya yang tatkala mereka membesarkan hari sabtu dan membenci unta sesudah masuk islam. (Hai orang-orang berima! Masuklah kamu ke dalam agama islam), ada pula ‘silmi’(secara keseluruhan) ‘hal’ dari islam artinya ke dalam seluruh syaritanya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti Langkah-langkah) atau jalan-jalan (setan), artinya godaan dan pemberdayaan untuk membedakan, (sesungguhnya ia mmusuhmu yang nyata), artinya jelas permusuhannya terhadapmu.³⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bersama bahwa sebagai seorang muslim di anjurkan untuk menerapkan Islam secara keseluruhan, kaitannya dengan hal ini adalah dalam permasalahan ataupun kegiatan ekonomi yang kita

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Semarang: Karya Agung, 2006), h.40.

³⁸ Tafsir ibnu katsir “al-baqarah 2/208

lakukan sehari-hari. Dengan menerapkan sistem ekonomi syariah tentunya seseorang akan memiliki landasan yang kokoh sekaligus untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan sistem Islam. Seperti pelarangan riba, maysir, tadlis, dan gharar.³⁹ Prilaku keuangan merupakan gambaran tentang bagaimana seorang individu dalam berperilaku ketika dihadapkan dengan keputusan keuangan yang harus dibuat. Perilaku keuangan syariah juga dapat diartikan sebagai implementasi yang didasarkan atas ilmu hukum syariah. Jadi setiap individu harus dapat mengelola keuangan pribadinya dengan cara membangun financial yang mengarah pada perilaku keuangan yang sehat dan sesuai dengan tuntunan hukum syariah sekaligus juga mematuhi apa saja yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan ekonomi Islam. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah adalah pengetahuan dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan yang sesuai dengan hukum dan prinsip dasar syariah yang kemudian akan bermanfaat bagi keuangan dimasa mendatang.⁴⁰

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan

Berdasarkan hasil survey Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat literasi keuangan orang tersebut.

³⁹ Penelitian Rike Setiawan, "Literasi Keuangan Islam" (Telaah Literatur), hlm,9.

⁴⁰ Ibid,

2. Strata Sosial

Semakin tinggi kelas strata sosial masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat literasinya. Kelompok strata sosial dikelompokkan atas dasar pengeluaran per bulan per kapita.

3. Kelompok Usia

Semakin dewasa usia kelompok masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat literasinya yang dipengaruhi oleh tingkat pola pikir masyarakat tersebut.⁴¹

5. Strategi Literasi Keuangan Oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Strategi nasional literasi keuangan Indonesia memiliki 3 pilar dimana pilar dimaksud diuraikan dalam 5 program strategis dan 16 program inisiatif. Ketiga pilar tersebut merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *well literate*. Adapun kerangka strategi nasional literasi keuangan Indonesia adalah:

1. Pilar ke 1 adalah Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan yang didukung dengan program strategis yaitu Menyusun program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan yang meliputi program inisiatif yaitu:⁴²
 - a. Menyusun materi literasi keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan untuk setiap jenjang pendidikan formal guna meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan.

⁴¹ Hasil Interview dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Pada Tanggal 9 Maret 2022, Pukul 13:00 WITA.

⁴² Ibid,

- b. Menyusun materi edukasi untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profesi.
 - c. Menyusun materi kampanye literasi keuangan.
 - d. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi literasi keuangan.
 - e. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat umum.
 - f. Melaksanakan kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan utilitas produk dan jasa keuangan.
2. Pilar ke 2 adalah Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan, yang didukung dengan program strategis menyusun database materi dan sistem informasi literasi keuangan dan menyiapkan prasarana pendukung literasi keuangan lainnya, yang di dukung dengan program inisiatif seperti :
- a. Menyusun database materi edukasi dan materi pendukung lainnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan edukasi dan kampanye literasi keuangan.
 - b. Membangun sarana media komunikasi
 - c. Menyiapkan SDM pelaksan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan.
 - d. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
 - e. Membentuk perangkat organisasi pendukung pelaksana literasi keuangan.
 - f. Mendorong terbentuknya komunitas masyarakat yang peduli terhadap literasi keuangan.⁴³

⁴³ Ibid,

3. Pilar ke 3 adalah Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan, yang didukung dengan program strategis yaitu mengembangkan dan memasarkan produk jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan didukung pula dengan program inisiatif seperti:
 - a. Mendorong sektor jasa keuangan untuk menciptakan produk dan jasa yang terjangkau oleh semua golongan.
 - b. Menciptakan produk dan jasa keuangan yang bersifat *bundling* (sinergi produk dan jasa antar sektor keuangan guna meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan).
 - c. Mendorong sektor jasa keuangan untuk memperluas aksesibilitas.
 - d. Mendorong sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan.⁴⁴

6. Tujuan Literasi Keuangan

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*;
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.
3. Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta

⁴⁴ Ibid,

meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:
5. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
6. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;⁴⁵

C. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”⁴⁶

⁴⁵ Ibid,

⁴⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, Tentang OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Tujuan OJK dibentuk antara lain agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Disamping itu tujuan pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian.⁴⁷

Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

a. Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan, yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Fungsi dan Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan :

a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi dari lembaga negara OJK ini adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

⁴⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Cet.I Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015). hlm. 21.

b. Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1. Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

2. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

4. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

5. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*forward looking*) serta dapat berfikir diluar kebiasaan (*out of the box thinking*).⁴⁸

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata kelola

⁴⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi* (cet. 14. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), hlm. 325

pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pasar modal.⁴⁹

Salah satu tugas yang menjadi fokus OJK adalah dengan melaksanakan strategi nasional literasi keuangan yang mana literasi keuangan adalah kemampuan untuk mengelola keuangan guna dapat menggunakan keuangan dengan lebih baik.

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatakan bahwa secara defenisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang, OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya. Untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, program strategi nasional

⁴⁹Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Cet, I Jakarta: Mitra Wacana Media 2015), hlm. 21.

literasi keuangan merencanakan tiga pilar utama. *Pertama*, mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. *Kedua*, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan. *Ketiga*, berbicara tentang pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau. Penerapan ketiga pilar tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan.⁵⁰

D. Strategi Literasi Keuangan

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate* (75,69%), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan dalam <http://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 19:50.

3. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Dengan hasil survei tersebut OJK bersama IJK menyusun strategi nasional literasi keuangan Indonesia SNILK yang di dalamnya terdapat berbagai macam program strategis dan program inisiatif yang bertujuan untuk lebih meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.⁵¹

Beragam kegiatan edukasi dan program inklusi keuangan secara berkelanjutan dilaksanakan oleh OJK bersama IJK. Edukasi keuangan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti edukasi komunitas, *training of trainer*, *outreach* program, kuliah umum, edukasi bahari, iklan layanan masyarakat, *edu expo*, bioskop keliling, wayangan dan simolek dengan target edukasi yaitu perempuan/ibu rumah tangga, UMKM, petani/nelayan, TKI/CTKI, pelajar/mahasiswa, profesional, karyawan dan pensionan.

Menurut Bhusna & Medury dalam Arianti mengungkapkan “Literasi Keuangan adalah kemampuan untuk membuat penilaian informasi dan mengambil keputusan yang efektif dan tentang penggunaan pengelolaan uang”

Menurut PACFL didalam pengukuran literasi keuangan pertama dimulai dari pengetahuan tentang keuangan (*financial knowledge*) sesudah itu lalu masuk kedalam tahap keterampilan keuangan (*financial skill*) dan pengetahuan yang

⁵¹ Ibid,

dimiliki di dalam diri (*perceived knowledge*), dan terakhir baru masuk kedalam tahap perilaku keuangan (*financial behavior*), setelah itu dilakukan maka literasi keuangan seseorang dapat diukur, meskipun pengukurannya tidak akan tepat sekali.

OJK Dalam program strategi ini dicanangkan tiga pilar utama untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan.

1. Pertama, mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan.
2. Kedua, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan.
3. Ketiga, berbicara tentang pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

Penerapan ketiga pilar tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan sendiri menerapkan strategi nasional literasi keuangan dengan tiga pilar.⁵²

Selain itu literasi keuangan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sistem inklusi keuangan, yang mana inklusi keuangan adalah dalam bahasa Inggris disebutkan *financial inclusion* bersinonim dengan frasa *inclusive financial system*,⁵³ yang berarti sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal,

⁵² Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan dalam <http://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 20:50.

⁵³ Brigit Helms, *Access for All: Building Inclusive Financial System* (Cet. 1, Washington, D.C.,:The World Bank, 2006), hlm.2.

noneklusif. Inklusivitas sistem keuangan ini sebenarnya lebih merujuk pada visi untuk menciptakan satu sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau semua kalangan.

Financial inclusion merupakan satu skema pembiayaan inklusif, dengan tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin dan berpenghasilan rendah.⁵⁴

Merujuk definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terminologi *Financial inclusion* mengacu kepada akses ke berbagai jasa keuangan, dengan biaya yang wajar, bagi orang-orang yang dianggap tidak *bankable* serta mereka yang menjalankan usaha di daerah perdesaan.

Oleh karena itu, program strategis yang telah dicanangkan dalam Strategi Nasional Financial Inclusion dan Strategi Nasional Financial Literacy harus menjadi komitmen yang terus menerus, agar dapat berkelanjutan, program *financial inclusion* harus disesuaikan dengan profil dan karakteristik berbagai kelompok

masyarakat dan juga harus memiliki alasan bisnis, bukan hanya menjadi program amal. Selain itu, inisiatif dalam rangka penguatan perlindungan konsumen juga perlu di dorong untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan.⁵⁵

⁵⁴ Ibid,

⁵⁵ Nusron Wahid, *Membongkar Hegemoni Keuangan*, (Cet. I.Jakarta: PT. Gramedia, 2014), hlm. 51-60.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka berfikir adalah dasar pemikiran suatu penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta melalui observasi dan telaah kepustakaan. Tolak ukur dalam meningkatkan literasi keuangan merupakan satu standar untuk menilai keberhasilan peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat Kota Palu. Dengan kata lain bahwa, semakin meningkatnya literasi keuangan pada masyarakat Kota Palu maka, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pencapaian tujuan maka, semakin rendah pula tingkat peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat Kota Palu. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar meningkatnya literasi keuangan kepada masyarakat Kota Palu. Maka yang harus dilakukan yakni mengacu pada data-data yang ada, hasil wawancara serta observasi yang berkaitan dengan Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Masyarakat Kota Palu. Yang pertama adalah Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan yang di dukung dengan program strategis yaitu Menyusun program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan yang meliputi program inisiatif yaitu

- 1) Menyusun materi literasi keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan untuk setiap jenjang pendidikan formal guna meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan.
- 2) Menyusun materi edukasi untuk masyarakat umum berdasarkan komunitas dan profesi.

- 3) Menyusun materi kampanye literasi keuangan.
- 4) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi literasi keuangan.
- 5) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat umum.
- 6) Melaksanakan kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan utilitas produk dan jasa keuangan.

Kemudian yang kedua adalah Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan, yang didukung dengan program strategis menyusun database materi dan sistem informasi literasi keuangan dan menyiapkan prasarana pendukung literasi keuangan lainnya, yang di dukung dengan program inisiatif seperti :

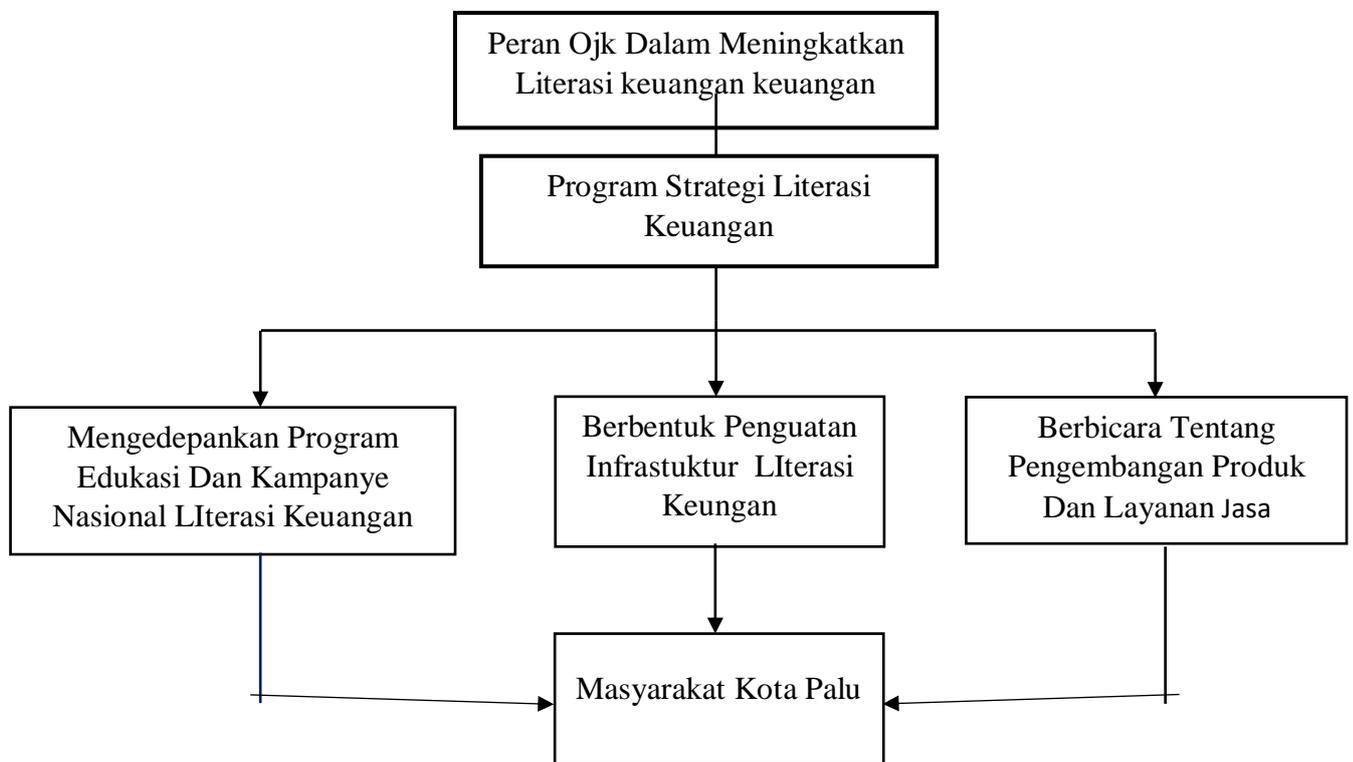
- 1) Menyusun database materi edukasi dan materi pendukung lainnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan edukasi dan kampanye literasi keuangan.
- 2) Membangun sarana media komunikasi
- 3) Menyiapkan SDM pelaksan edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
- 5) Membentuk perangkat organisasi pendukung pelaksana literasi keuangan.
- 6) Mendorong terbentuknya komunitas masyarakat yang peduli terhadap literasi keuangan.

Yang ketiga adalah Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan, yang didukung dengan program strategis yaitu mengembangkan dan memasarkan produk jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan didukung pula dengan program inisiatif seperti:

- 1) Mendorong sektor jasa keuangan untuk menciptakan produk dan jasa yang terjangkau oleh semua golongan.

- 2) Menciptakan produk dan jasa keuangan yang bersifat *bundling* (sinergi produk dan jasa antar sektor keuangan guna meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan).
 - 3) Mendorong sektor jasa keuangan untuk memperluas aksesibilitas.
- yang dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan & Desain Penelitian

Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Pengukuran).⁵³ Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban-jawaban atas perumusan masalah. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁵⁶

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research), dimana penelitian ini akan dilakukan dengan cara menulis, mengklasifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.⁵⁷

Penelitian ini diawali dengan adanya hasil survei dari OJK pusat,

⁵⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Cet, I, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 21.

⁵⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Untuk Penulis Laporan Skripsi, Tesis* (Cet, I, Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 10.

yaitu melihat berbagai program peningkatan literasi keuangan. Sedangkan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat, dan berupaya menarik realitas sosial itu kepermukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tandan, atau gambaran

tertentu.⁵⁸ Dalam penelitian ini pembahasan akan difokuskan pada bagaimana peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Kota Palu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Sulawesi Tengah dengan alamat kantor: Jl. Basuki Rahmat No. 164 Palu Selatan. Lokasi ini diambil oleh penulis dikarenakan kantor OJK Sulawesi Tengah merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, sehingga peneliti mudah mendapatkan data yang diinginkan terdapat pada lokasi tersebut. Adapun objek penelitian ini adalah Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Masyarakat Kota Palu.

C. Jenis Data

Menurut jenisnya, data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.⁵⁹

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti literasi keuangan dalam buku Untuk Indonesia yang Kuat: 100 Langkah untuk Tidak Miskin, Literate., Hananto, ligwina. 2011., Jakarta.

⁵⁸ Ibid,

⁵⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet.IX., Yogyakarta, Pustaka Belajar, 1998), hlm.91.

Untuk mendapat data primer dari penelitian ini, maka penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara purposive sampling pada Karyawan Kantor OJK Sulawesi Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis dapat berupa buku-buku, berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya.⁶⁰ Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang dapat mendukung penulis untuk lebih menguatkan sumber data penelitian.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Di dalam sebuah penelitian, subjek peneliti merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti.⁶¹ Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah. Sedangkan objek utama dalam penelitian ini adalah Peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat kota Palu.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini yaitu Peran OJK Sulawesi Tengah dalam usaha meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat.

⁶⁰ Zaenal Abidin, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, (Cet. XIII, Purwokerto: STAIN Perss, 2014), hlm. 88.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Cet. XIII, Jakarta, Rienka Cipta, 1992), hlm. 119.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan.⁶² Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah Karyawan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Sulawesi Tengah dan sekaligus data-data jumlah peningkatan Literasi dari tahun 2016 sampai 2021 berupa dokumen yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data.

1. Observasi

Metode Observasi adalah merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁶³ pengukuran tersebut dilakukan dengan observasi secara tidak langsung.

⁶² Zaenal Abidin, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, (Cet. XIII, Purwokerto: STAIN Perss, 2014), hlm. 88.

⁶³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 30.

Data yang diperoleh melalui teknik observasi adalah data-data yang diperlukan terkait dengan usaha OJK meningkatkan literasi keuangan. Oleh karena itu, teknik observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi partisipan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu).

Wawancara dengan tujuan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian.⁶⁴

Table 3.1 (Daftar Informan)

No	Nama	Jabatan
	pak Triyono Raharjo	kepala Kantor OJK Sulteng
	pak Ferdian Ario Sasongko	kepala Sub Bagian Edukasi Perlindungan Konsumen Kantor OJK Sulteng
	Ibu Kartini	guru SMAN 7 Palu

3. Metode dokumentasi

⁶⁴ Ibid,

Metode dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, internet, dan media lainnya. Data yang diharapkan diperoleh melalui metode ini yaitu mengenai kegiatan program-program OJK Sulawesi Tengah dalam meningkatkan literasi keuangan.

Dalam pelaksanaannya metode studi dokumentasi akan dilakukan oleh penulis terhadap informan penelitian yaitu pimpinan OJK Sulawesi Tengah yaitu Bapak Triyono Raharjo (Kepala Kantor OJK Sulawesi Tengah), dan Bapak Ferdian Ario Sasongko (Kepala Sub Bagian Edukasi Perlindungan Konsumen Kantor OJK Sulawesi Tengah) secara detail tentang peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan, diantaranya tentang:

- a) Profil OJK Sulawesi Tengah
- b) Bagaimana aplikasi strategi OJK Sulawesi Tengah dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat.
- c) Program apa saja yang dilakukan OJK Sulawesi Tengah dalam kaitanya dengan literasi Keuangan.
- d) Pengumpulan data terkait literasi keuangan.
- e) Program sosialisasi di Kantor OJK Sulawesi Tengah

Metode pengumpulan data dengan penelusuran dokumen-dokumen yang ada dan hasil pemaparan dari surat balasan OJK mengenai literasi keuangan adalah metode utama yang digunakan dalam penelitian ini,

karena data-data yang diperoleh nantinya lebih lengkap dan akurat dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan-informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji pengecekan keabsahan data yang digunakan penulis adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan dan triangulasi. Triangulasi yang digunakan ada 3 yaitu:⁶⁵

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yangdikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

⁶⁵ Lexy.Jm Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.XXXVIII, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005),hlm. 330

2. Triangulasi Metode

Dilakukan peneliti untuk pencairan data tentang fenomena yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan metode-metode ini kemudian dibandingkan sehingga diperoleh data yang dipercaya.

3. Triangulasi Teori

Dengan cara membandingkan dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan akan menyamakan persepsi atas data yang diperoleh.

Disamping penulis menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data diatas, maka penulis melakukan perbincangan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat, yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk dirundingkan.⁶⁶

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan dengan tujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan interpertasi dengan klarifikasi penafsiran dari hasil lain terutama dengan Dosen Pembimbing.⁶⁷

⁶⁶ Ibid,

⁶⁷ Ibid,

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum OJK Sulteng

1. Sejarah Berdirinya OJK Sulteng

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu Lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁶⁸

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Pada dasarnya Undang-Undang tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata kelola

⁶⁸ Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

2. Profil Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk pada tanggal 01 Januari 2014. Kantor yang berkedudukan di Kota Palu itu Merupakan bagian dari kordinasi Kantor Regional VI yang berkedudukan di Makassar. Kantor Regional VI OJK Sulawesi, Maluku, dan Papua mencakup wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat. Adapun wilayah kordinasinya meliputi Kantor OJK Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, serta Papua dan Papua Barat. Kantor regional VI tersebut menjalankan fungsi dan perizinan sektor perbankan serta edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.⁶⁹

Wilayah kerja KOJK Sulawesi Tengah mencakup pula Provinsi Gorontalo, selain wilayah Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri.

Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sebagai Lembaga baru dengan cakupan tugas yang cukup luas,

⁶⁹ Murniati Ruslan, "*Otoritas Jasa Keuangan Dan Kiprahnya Di Kota Palu*". Vol 10 No 5, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2016. Hlm 31.

kantor OJK Sulteng menyadari perlunya bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan fungsi, tugas dan wewenangnya. Berbagai kegiatan edukasi telah diselenggarakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap Lembaga jasa keuangan.

3. Landasan Hukum OJK Sulawesi Tengah

a. Landasan Filosofis:

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

b. Landasan Yuridis:

a) Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

b) UU No. 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

c. Landasan Sosiologis:

1) Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

- 2) adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai subsektor keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
- 3) banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.⁷⁰

4. Visi Misi OJK Sulawesi Tengah

Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

a. Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan, yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.⁷¹

⁷⁰ Kasmir, S.E., 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi (cet. 14. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada). Hlm.325

⁷¹ Otoritas jasa keuangan, (visi dan misi otoritas jasa keuangan) <http://www.ojk.go.id> (diakses pada tanggal 10 desember 2022, pukul 20:00 wita).

b. Misi

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan masyarakat.⁷²

Fungsi dan Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan

a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi dari lembaga negara OJK ini adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

b. Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1) Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

2) Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3) Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

⁷² Ibid,

4) Inklusif

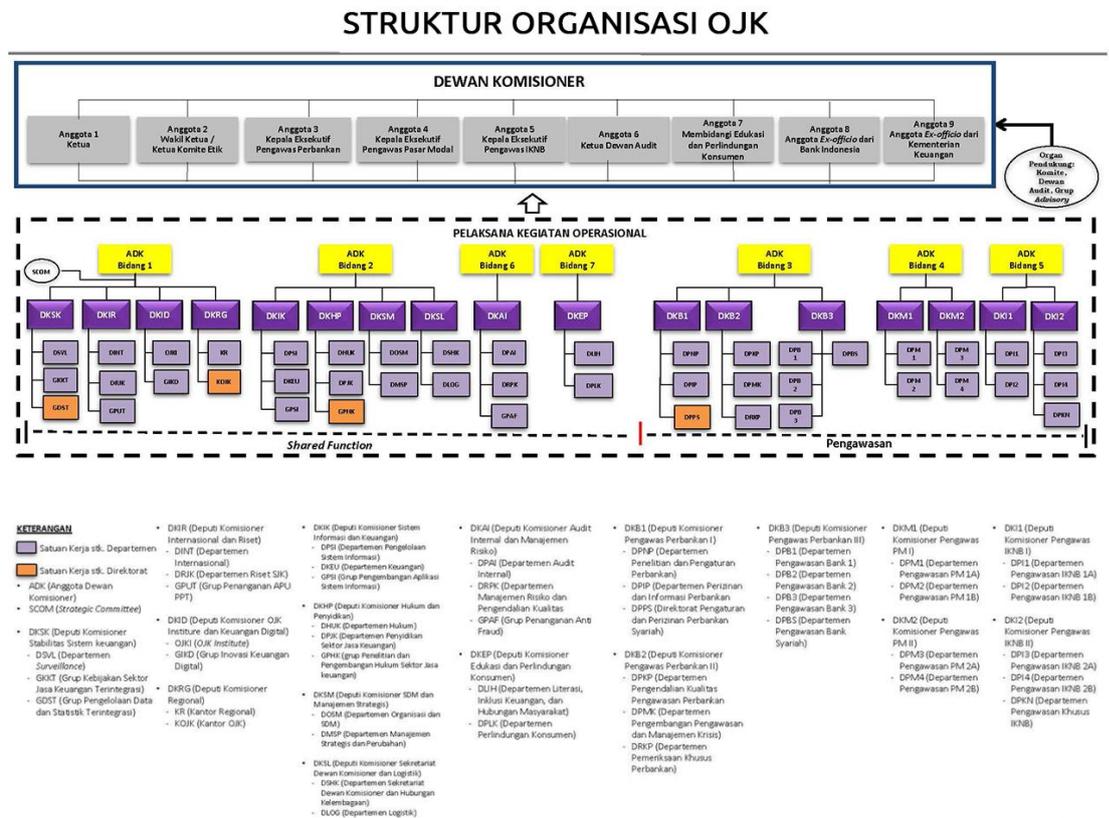
Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

5) Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (forward looking) serta dapat berfikir diluar kebiasaan (out of the box thinking).⁷³

5. Struktur Organisasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Gambar 4.1



⁷³ Kasmir, S.E., 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi-cet. 14. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 325.

B. Hasil Penelitian

1. Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat

Untuk mengetahui peran OJK Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat Kota Palu dilakukan wawancara terhadap karyawan OJK Sulteng hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai peran OJK Sulteng dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat sebagai berikut :

- a) Sosialisasi dan edukasi literasi keuangan dilakukan dengan berbagai program

Sosialisasi dan edukasi tentang literasi keuangan semakin gencar dilakukan OJK Sulteng dimana kemampuan OJK Sulteng dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi sehingga informasi mengenai kegiatan tersampaikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mendapatkan tambahan informasi dari kepala subbagian perlindungan konsumen (OJK) Sulteng yaitu bapak Ferdian Ario Sasongko yang mengatakan:

Masyarakat harus diberi pengertian mengenai literasi keuangan sehingga masyarakat dapat mengelola keuangan baik individual maupun kelompok. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan OJK Sulteng adalah merupakan Langkah awal untuk mencapai tujuan

dalam khususnya meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi literasi keuangan harus direncanakan secara sistematis dengan memaksimalkan sumber data dan media yang ada supaya tujuan bisa tercapai dengan baik.⁷⁴

Penjelasan tersebut juga didukung oleh artikel sulteng raya news Dimana di dalam artikelnya tersebut dikatakan bahwa OJK Sulteng melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan dengan berbagai cara yang dilakukan yakni dengan :⁷⁵

a. Sosialisasi dan edukasi\

Sosialisasi mengenai literasi keuangan telah melaksanakan 24 kegiatan di tahun 2022, literasi dan edukasi keuangan yang diantaranya ditujukan kepada UMKM, pelajar/mahasiswa, pondok pesantren, guru, PNS, dosen, kelompok profesi masyarakat lainnya.

Informasi yang sama juga dijelaskan oleh bapak Ferdian Ario Sasongko kepala subbagian perlindungan konsumen (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatakan :

Bentuk kegiatan sosialisasi tersebut antara lain berupa sosialisasi waspada investasi di kota Palu, edukasi

⁷⁴ Ferdian Ario Sasongko, kepala subbagian perlindungan konsumen (OJK) Sulteng, wawancara 25 november 2022.

⁷⁵ www.sultengraya.news.id/2022/03/literasi-keuangan-capai-30%, di akses pada tanggal 13 desember 2022 pada pukul 20:00 wita.

keuangan journalist update, talkshow pasar modal.⁷⁶

Informasi diatas didukung dari wawancara kepada pihak SMA 7 Palu, bahwa betul adanya bahwa OJK pernah memberikan materi tentang OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK).⁷⁷

b. Melalui Media Masa

Sosialisasi dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Media elektronik menggunakan radio ataupun stasiun televisi lokal.

Berdasarkan penejelasan di atas penulis juga mendapatkan informasi melalui hasil wawancara dengan kepala subbagian perlindungan konsumen (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah yaitu bapak Ferdian Ario Sasongko yang mengatakan :

Kegiatan OJK Sulteng dapat termuat di koran-koran atau media cetak. Di bagian internal sendiri OJK juga memiliki majalah mengenai OJK namun belum dapat dikonsumsi untuk masyarakat umum hanya untuk kalangan internal OJK Sulteng saja.⁷⁸

c. Secara langsung

Sosialisai yang dilakukan secara langsung melalui 2 sistem.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis juga mendapatkan informasi melalui hasil wawancara dengan kepala subbagian perlindungan konsumen (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah yaitu

⁷⁶ Ferdian Ario Sasongko, kepala subbagian perlindungan konsumen (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara 25 November 2022.

⁷⁷ Kartini S,Pd, bagian Kurikulum SMA 7 Palu, wawancara 3 januari 2023.

⁷⁸ Ferdian Ario Sasongko, kepala subbagian perlindungan konsumen (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara 25 November 2022.

bapak Ferdian Ario Sasongko yang mengatakan :

Sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh karyawan OJK kepada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan. Kedua, masyarakat yang berkonsultasi secara langsung datang ke kantor OJK Sulteng.⁷⁹

Informasi di atas juga didukung bahwa beberapa masyarakat datang untuk konsultasi secara langsung di OJK Sulteng pada saat penulis melakukan wawancara kepada pihak OJK Sulteng.

b) Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi Melalui Pembentukan program Literasi Keuangan

Tujuan literasi keuangan adalah meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan dan mengubah sikap dan perilaku dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas penulis juga mendapatkan informasi melalui wawancara Bersama salah satu karyawan yang bekerja di OJK Provinsi Sulawesi Tengah yaitu ibu Pupung Pamungkas yang mengatakan :

Untuk meningkatkan pertumbuhan literasi keuangan OJK mendorong pembentukan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di setiap kabupaten/kota di wilayah kerjanya. Sampai

⁷⁹ Ferdian Ario Sasongko, kepala subbagian perlindungan konsumen (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara 25 November 2022

⁸⁰ RPOJK Literasi dan Inklusi Keuangan, BAB II, Pasal 2 dan 3.

saat ini terbentuk empat TPKAD di beberapa daerah di Sulteng yaitu TPKAD Provinsi Sulteng, TPKAD Kota Palu, TPKAD Kabupaten Sigi dan TPKAD Luwuk Banggai.⁸¹

Pada tahun ini program kerja TPKAD, yaitu memfasilitasi pembiayaan lembaga jasa keuangan ke sektor UMKM/start up business, implementasi Gerakan budaya menabung bagi pelajar, peningkatan agen laku pandai di daerah dan asistensi UMKM masuk bursa.

TPKAD Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah adalah forum koordinasi antara instansi dan stakeholder terkait meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Hadirnya TPKAD ini bertujuan mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, dan mencari terobosa dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mendapatkan tambahan informasi dari kepala subbagian perlindungan konsumen (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah bapak Ferdian Ario Sasongko yang mengatakan :

⁸¹ Pupung Pamungkas, staf subbagian perlindungan konsumen (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara 25 November 2022.

TPKAD akan mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.⁸²

c) Sinergi Program atau Bekerja Sama Dengan Berbagai Pihak

Sinergi program atau bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu supaya dalam program yang dilaksanakan lebih optimal dan menimbulkan citra yang baik. Saat ini OJK Sulteng sudah melaksanakan berbagai program yang bekerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan sosial, berdasarkan hasil wawancara bapak Ferdian Ario Sasongko, yakni :

1. Sosialisasi kepada santri, yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022, dengan tema edukasi SAKINAH (Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah) sosialisasi ini bertujuan dapat meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat sehingga berkontribusi dalam upaya pencegahan agar tidak terjerumus pada utang yang konsumtif atau penipuan yang berkedok investasi.
2. Sosialisasi kepada mahasiswa/pelajar, yang dilakukan oleh OJK adalah dengan menggandeng salah satu fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Diadakan untuk seluruh mahasiswa FEBI dengan harapan seluruh mahasiswa FEBI mengenal lebih jauh lembaga

⁸² Ferdian Ario Sasongko, kepala subbagian perlindungan konsumen (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara 25 November 2022

keuangan, khususnya yang berada di Sulawesi Tengah.⁸³

Kegiatan Kerjasama atau kolaborasi tersebut dijalankan menjadikan OJK Sulteng menjadi eksis di mata masyarakat dan dapat dikatakan optimal. Karena yang mendapatkan sosialisasi dan ikut sosialisasi oleh OJK Sulteng mereka jadi dapat lebih mengenal berbagai macam produk jasa keuangan sehingga masyarakat dapat mengelola keuangannya secara baik dan benar.

⁸³ Ferdian Ario Sasongko, kepala subbagian perlindungan konsumen (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara 25 November 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian dan berhasil mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisa dan memunculkan temuan-temuan penelitian, maka diperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian mengenai “Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Masyarakat Kota Palu”.

Peran Yang dilakukan oleh OJK Provinsi Sulawesi Tengah, pertama sosialisasi dan edukasi literasi keuangan dilakukan dengan berbagai program. Contohnya : Sosialisasi mengenai literasi keuangan telah melaksanakan 24 kegiatan di tahun 2022, literasi dan edukasi keuangan yang diantaranya ditujukan kepada UMKM, pelajar/mahasiswa, pondok pesantren, guru, PNS, dosen, kelompok profesi masyarakat lainnya.

Kedua, Optimalisasi sosialisasi dan edukasi melalui pembentukan program literasi keuangan. Dibentuknya TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan) Provinsi Sulawesi Tengah, salah satu upaya untuk meningkatkan literasi Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketiga, Sinergi program atau bekerjasama dengan berbagai pihak. Kegiatan Kerjasama atau kolaborasi tersebut dijalankan menjadikan OJK Sulteng menjadi eksis di mata masyarakat dan dapat dikatakan optimal.

Karena yang mendapatkan sosialisasi dan ikut sosialisasi oleh OJK Sulteng mereka jadi dapat lebih mengenal berbagai macam produk jasa keuangan sehingga masyarakat dapat mengelola keuangannya secara baik dan benar.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah tentang Peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Penulis memiliki beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya proses edukasi terhadap konsumen lebih dapat diterima baik oleh semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan program edukasi yang dilakukan oleh OJK Sulteng sudah baik. Namun menurut pengamatan penulis, pelaksanaan program edukasi dan kampanye nasional perlu ditingkatkan lagi dari mulai program edukasi dan daerah jangkauan serta masyarakat sasaran edukasi sehingga pemahaman akan tingkat literasi keuangan dapat menyeluruh dan merata di segala aspek. Beberapa hal yang menjadi masukan dari penulis antara lain:

1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu kualitas edukasi konsumen terhadap masyarakat dan peningkatan pengetahuan terkait dengan literasi keuangan.
2. memberikan program terkait literasi keuangan dan dapat menyeluruh kesemua golongan masyarakat.

3. Perlu ditingkatkan kembali program – program edukasi dan kampanye nasional dengan aspek jangkauan masyarakat yang lebih menyeluruh sehingga pengetahuan masyarakat akan literasi keuangan lebih baik sehingga terwujud masyarakat yang Well Literate
4. Masukan Untuk Peneliti Selanjutnya, peneliti Alangkah baiknya jika pada penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan faktor-faktor lain yang dapat mendorong Peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Cet.XIII Jakarta: Rienka Cipta, 1992
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet. IX, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998
- Ayu;Krishna, Rofaida, Rofi; Sari, Maya. 2010. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya" *jurnal Upi*, Vol. 5 No18.
- Budi santoso Totok dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat, 2011
- Daim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Semarang: Karya Agung, 2006
- Fahmi Irham, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, Jakarta, Mitra Wacana Media,2015.
- Gunawan Ade, Delyana Rahmawany Pulungan, Murvian Koto, "*Tingkat Literasi Keuangan Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*" Medan, 2019
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research: Untuk Penulis Laporan Skripsi, Tesis dan Disertasi jilid I* Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Hermansyah. "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*".
- Hikmat Mahi M., *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi-cet. XIV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Krishna, Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-Faktor yang Mempegaruhinya, *proceeding of The 4th International Coference on Teacher Education : Join Conference UPI & UPSI Bandung , Indonesia, 8-10 November 2010*
- Meleong Lexy.Jm, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.XXXVIII, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

- Mitchell Lusardi, A &, O.S. "BabyBoomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth". *Journal of Monetary Economics*, 200754 (1)
- Mardiani Tutik, Darman Darman, "Peran Pengetahuan, Sikap, Dan Gender Terhadap Perilaku Keuangan Bisnis Startup Kota Palu". *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako* Vol. 8 no 2., 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Literasi, Edukasi, dan Inklusi Keuangan", *Direktorat Literasi dan Edukasi*.
- Ruslan Murniati, "Otoritas Jasa Keuangan Dan Kiprahnya Di Kota Palu" *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Negeri Islam Palu*. Vol 10 No 05, 2016.
- RPOJK Literasi Dan Inklusi Bab II Pasal 2-3
- SBY Resmikan Blueprint Literasi Keuangan". www.sindonews.com diunduh pada 20 November 2016.
- Surat Edaran OJK SP109/DKNS/OJK/X/201
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sujarweni V. Wiratana, *Metodologi Penelitian, Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015
- Wahid Nusron, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*. Cet I; Jakarta: Gramedia, 201
- Widyatama Arif "Peran Pengetahuan, Sikap, dan Gender Terhadap Perilaku Keuangan Bisnis Startup Kota Palu Pendidikan Akuntansi Dalam Bangunan Literasi Keuangan UKM Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan", *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol 25, No 2 , 2020.
- Yanti Winda, Syamsul, Siti Zuroh, *Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha Kuliner Di Kota Palu*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 5, No. 18, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : S- 04 /KO.0602/2022

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdian Ario Sasongko
Jabatan : Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah

Menerangkan bahwa Mahasiswa dengan identitas di bawah ini :

Nama : Rina Aprilia
NIM : 183150049
Program Studi : Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Judul Penelitian : Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Kota Palu.

telah melakukan penelitian di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 9 Desember 2022.

Demikian Surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 20 Desember 2022
Kepala Subbagian Edukasi dan
Perlindungan Konsumen,



**OTORITAS
JASA
KEUANGAN**
Ferdian Ario Sasongko

Kp.: D.03/KO.0602

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan
1	18-Jan-22	Sosialisasi Waspada Investasi di Kota Palu
2	19-Jan-22	Sosialisasi Tindak Pidana di SJK
3	7-Apr-22	Talkshow Cerdas Berinvestasi
4	20-Apr-22	Gebyar Ramadhan Nusantara
5	27-Jul-22	Talkshow Radio Waspada! Penipuan Berkedok Investasi
6	30-May-22	Edukasi Keuangan Mengenal Produk dan Layanan Lembaga Jasa Keuangan
7	30-May-22	Edukasi Keuangan Pasar Modal di STIE Tolitoli
8	31-May-22	Edukasi Keuangan Pasar Modal di Universitas Madako
9	21-Jun-22	Edukasi Keuangan Mengenal Produk dan Layanan Lembaga Jasa Keuangan dan Waspada Investasi
10	27-Jun-22	Edukasi Keuangan KREASI MUDA di Universitas Tadulako
11	9-Aug-22	Edukasi Keuangan Journalist Update
12	24-Aug-22	Edukasi Keuangan KREASI MUDA di Universitas Kristen Tentena
13	25-Aug-22	Edukasi Keuangan Kepada Bhayangkari Kabupaten Morowali Utara
14	26-Aug-22	Edukasi Keuangan KREASI MUDA di SMA N 1 Petasia
15	30-Aug-22	Talkshow Jaminan Fidusia
16	6-Sep-22	Edukasi Keuangan Pasar Modal
17	6-Sep-22	Edukasi Keuangan Pasar Modal Kepada ASN di Kabupaten Luwuk
18	7-Sep-22	Edukasi Keuangan Pasar Modal di Universitas Muhammadiyah Luwuk
19	25-Oct-22	Edukasi Keuangan Mengenal Produk dan Layanan Lembaga Jasa Keuangan dan Waspada Investasi
20	26-Oct-22	Kegiatan Edukasi SAKINAH (Santri Cakap Literasi keuangan Syariah)
21	26-Oct-22	Talkshow Pasar Modal
22	27-Oct-22	Talkshow Peran BPR dan BPPRS dalam Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
23	29-Oct-22	Rangkaian Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan
24	18-Nov-22	Edukasi Keuangan OJK Mengajar

GAMBAR DOKUMENTASI



(Wawancara Bersama Ibu Popong Pamungkas Salah satu Staf Kantor OJK Sulteng)



(wawancara Bersama Ibu Kartini Salah Satu Guru di SMAN 7 Palu Yang Mengikuti Sosialisasi Ojk Sulteng)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rina Aprilia
TTL : ToliToli, 09 April 2000
Nim : 183150049
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln.Puro, Kel.Tondo
Kec.Mantikulore Kota.Palu
No. Hp : 082238138868
Email : rinaapriliah942@gmail.com
Nama Ayah : AWALUDDIN
Nama Ibu : JUMIATI

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD, Tahun Kelulusan : SDN 5 TOLI-TOLI, 2012
- b. SMP, Tahun Kelulusan : SMPN 3 TOLI-TOLI, 2015
- c. SMA, Tahun Kelulusan : SMKN 1 TOLI-TOLI, 2018